

ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KALIMANTAN TAHUN 2011 S.D 2015

Cipto Priyono

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta 55281, Indonesia

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam rentang waktu 2011-2015. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014) yakni 1) solvabilitas jangka pendek, 2) solvabilitas jangka panjang, 3) solvabilitas anggaran, 4) fleksibilitas keuangan, 5) solvabilitas layanan, dan 6) kemandirian keuangan. Tahun 2015 terdapat tambahan dimensi solvabilitas operasional karena pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan dokumen sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan selama lima tahun (2011 s.d 2015). Data yang digunakan sebanyak 272 LHP LKPD, sementara 27 LHP tidak digunakan karena beropini tidak wajar dan *disclimer*. Hasil penelitian ini berupa pemeringkatan dan pengkategorian, serta deskripsi karakteristik atas tiga pmda tertinggi dan tiga pmda terendah indeks kondisi keuangannya (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216). Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Selanjutnya hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Kondisi Keuangan, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Anggaran, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Layanan, Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Keuangan

PENDAHULUAN

Tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (UU No.23 Tahun 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2006). Dalam kurun waktu lima tahun yakni 2011 hingga 2015, alokasi transfer ke daerah meningkat hingga 56,1% atau sebesar Rp231,3 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011, alokasi transfer ke daerah sebesar Rp412,5 triliun. Sedangkan pada APBN-P 2015, alokasi transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp643,8 triliun dan dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Alokasi transfer ke daerah tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yakni sebesar Rp352,8 triliun, diikuti Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp110 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp58,8 triliun. Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) meningkat menjadi

Rp17,1 triliun, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp547,5 miliar, dan Dana Transfer Lainnya sebesar Rp104,4 triliun (Direktorat Jenderal Anggaran, 2015).

Aliran dana dalam wujud dana perimbangan tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya. Disamping itu juga untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan ketimpangan antarpemerintah daerah (Auzar, 2015). Ketimpangan tersebut dapat difahami sebagai konsekuensi perbedaan kemampuan pengelolaan keuangan antarpemerintah daerah.

Kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala yang kurang baik. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam dua tahun terakhir (2015 dan 2016) terus mengalami penurunan (Prokaltim, 2015). APBD 2013 tercatat Rp15,13 triliun, sedangkan pada APBD 2015 menjadi Rp11,53 triliun dan APBD perubahan 2016 ditetapkan lebih rendah lagi yakni pada posisi Rp7,6 triliun (Tribunnews, 2016). Kesulitan keuangan salah satunya berimbas pada 10 pemda di Kaltim yang kesulitan membayar utang jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang hingga April 2016 mencapai total Rp153,2 miliar (Radarkaltim, 2016). Kondisi ini diperburuk dengan adanya kebijakan pemangkasan dana transfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2016 sehingga

mengakibatkan pemda-pemda di Kaltim harus menanggung beban utang ke kontraktor (Prokaltim, 2017).

Pelaksanaan kebijakan daerah pada prinsipnya harus selaras dengan rencana strategis pemerintah pusat. Namun demikian, persepsi masing-masing pemangku kepentingan atas rencana strategis pemerintah pusat beragam. Hal ini berimbas pada beragamnya program dan kegiatan masing-masing pemerintah daerah. Kondisi ini didukung dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih dominan pada ranah prinsip dan tidak disertai petunjuk yang lebih teknis. Akibatnya kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah juga bervariasi (Ritonga, 2014). Rusmin dkk. (2014) menemukan fakta bahwa pemerintah daerah yang berdomisili di Jawa cenderung melaporkan kondisi keuangan yang lebih baik dari pada pemerintah daerah yang berada di luar pulau Jawa.

Kondisi keuangan antarpemerintah daerah yang berbeda-beda dan belum dilakukannya analisis kondisi keuangan tersebut menyulitkan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Hal ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran pemerintah daerah terhadap kondisi keuangan sebagai sistem peringatan dini. Dengan demikian, dipandang perlu dilakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan selama periode 2011 s.d 2015. Sekaligus untuk dapat diketahui keterbandingan kondisi keuangan antarpemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagaimana dikutip dari Ritonga (2014) kondisi keuangan didefinisikan oleh Groves dkk. (1981) dan Nollenberger dkk. (2003) sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai pelayanan secara berkelanjutan. Keduanya melihat kondisi keuangan dalam arti sempit sebagai solvabilitas kas dan solvabilitas anggaran, sedangkan dalam arti luas sebagai solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan. Definisi tersebut kemudian diadopsi dan diperjelas oleh Wang dkk. (2007). Wang dkk. (2007) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai tingkat solvabilitas keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari solvabilitas kas, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan. Sementara itu, Zafra-Gomez dkk. (2009) mendefinisikan kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi utang dan menyediakan layanan pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Ramsey (2013) mendefinisikan

kondisi keuangan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan satu atau beberapa hal yakni melunasi tagihan saat ini, menyeimbangkan anggaran tahunan, memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang, dan memenuhi persyaratan tingkat layanan saat ini dan masa depan.

Dari berbagai definisi kondisi keuangan tersebut, definisi yang paling banyak diterima adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu dan kemampuannya untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun demikian, definisi tersebut kurang memperhatikan aspek lingkungan pemerintahan, terutama tujuan (Ritonga dkk., 2012).

Ritonga dkk. (2012) dan Ritonga (2014a, 2014b) berpendapat bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan efek keuangan yang diakibatkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, definisi kondisi keuangan pemerintah daerah sebaiknya diturunkan dari tujuan nasional. Hal ini selaras dengan Cabaleiro dkk. (2012) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan digambarkan sebagai persyaratan utama dalam memenuhi tujuan dari institusi manapun, tidak terkecuali institusi pemerintah daerah. Konseptualisasi definisi keuangan daerah yang ditawarkan Ritonga (2014) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan
Pemerintah Daerah



Sumber : Ritonga (2014, 106)

Berdasarkan konseptualisasi tersebut, Ritonga (2014) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, untuk mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangannya secara efisien dan efektif.

Teori Permintaan dan Penawaran

Hukum permintaan menjelaskan hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik jumlah barang yang diminta sedikit dan apabila harga rendah jumlah barang yang diminta meningkat. Sedangkan hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya semakin rendah

harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit.

Dalam konteks pemerintah daerah, Deacon (1987) dalam Ritonga (2014) berpendapat bahwa teori permintaan berlaku juga untuk belanja di sektor publik. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah dialokasikan untuk berbagai layanan sebagaimana rumah tangga mengalokasikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Ritonga (2014) menawarkan analisis proses penawaran dan permintaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Permintaan untuk layanan dan produk yang disediakan oleh pemerintah daerah tergantung pada banyak faktor, seperti pendapatan, harga, populasi, harga produk lain, kualitas, selera masyarakat, dan harapan akan masa depan. Sedangkan pada sisi penawaran, penyediaan barang dan jasa pemerintah daerah dipengaruhi oleh basis pendapatan dan biaya untuk memproduksi barang dan memberikan layanan pada masyarakat. Dari berbagai faktor tersebut, faktor yang relevan untuk lingkungan pemerintah daerah yakni biaya jasa dan produk; dan biaya jasa pengiriman dan barang (Ohls dan Wales, 1972 dalam Ritonga, 2014)

Faktor-faktor Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah telah cukup banyak dilakukan. Sebagaimana dikutip dalam Ritonga (2014),

pada tahun 1986 Berne dan Scharman telah menjelaskan beberapa faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) selera dan kebutuhan masyarakat (kemiskinan, pendidikan, pengangguran dll.); 2) kondisi regional yang memengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa publik (kepadatan penduduk, luas wilayah, iklim dll.); 3) biaya-biaya tenaga kerja, modal dan sumber daya produktif lainnya (tingkat upah, suku bunga, dll.); 4) kemakmuran masyarakat (pendapatan, nilai properti, penjualan ritel dll.); 5) struktur politik dan pemerintahan di wilayah dan daerah sekitarnya (dominasi pemerintah daerah, struktur manajemen pemerintah daerah, dll.); 6) kebijakan pemerintah pusat yang memengaruhi sumber daya lokal, kendala-kendala, dan tanggung jawab pemerintah daerah;) dan 7) kebijakan keuangan pemerintah dan implementasinya (tarif pajak, utang, dll.).

Carmeli (2008) mengembangkan model yang pernah diajukannya tahun 2002. Ia memilih pemerintah daerah di Israel sebagai konteks penelitiannya. Menurutnya terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah di Israel, yakni faktor struktural, faktor organisasi, dan faktor hibrida. Faktor struktural meliputi ukuran pemerintah daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan distribusi kekayaan pemerintah. Faktor organisasi terdiri dari penilaian kinerja, transparansi, dan manajemen

daerah. Faktor hibrida terdiri dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ritonga (2014) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuangan daerah melalui analisis proses permintaan dan penawaran barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penelitian tersebut menguji tujuh faktor sebagai variabel independen yang meliputi populasi, kepadatan penduduk, profil usia masyarakat, kekayaan masyarakat, pendapatan dasar pemerintah daerah, efisiensi keuangan, dan biaya produksi barang dan jasa. Berdasarkan model regresi berganda, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa empat faktor (efisiensi keuangan, biaya barang dan jasa, populasi, dan pendapatan dasar pemerintah daerah) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tiga faktor lainnya (populasi, kepadatan penduduk, profil usia masyarakat, dan kekayaan masyarakat) tidak berpengaruh secara signifikan.

Rusmin (2013) meneliti hubungan antara karakteristik demografi dan perbedaan kondisi keuangan dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Atribut demografi yang digunakan antara lain lingkup pemerintah daerah, lokasi, kepemilikan, masa jabatan, jenis kelamin, indeks pembangunan manusia (IPM), dan ukuran pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup dan lokasi pemerintah daerah membantu

menjelaskan semua variabel kondisi keuangan. Temuan selanjutnya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah yang berdomisili di Jawa cenderung melaporkan kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berdomisili di pulau-pulau lain. Kesimpulan akhir yakni semakin besar populasi unit pemerintah daerah, semakin tinggi posisi likuiditasnya, semakin baik kemampuannya untuk mendanai layanan umum, dan semakin besar kemungkinannya untuk memperoleh pendapatan dari perusahaan lokal.

Model Ritonga, Clark dan Wickremasinghe

Ritonga dkk. (2014) mengawali pengembangan model dengan mengkonsepkan definisi kondisi keuangan pemerintah daerah sebelum menentukan indikator. Hal ini memenuhi atribut *face validity*. Uji korelasi pearson juga dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara signifikan berkorelasi dengan kondisi keuangan pemerintah daerah (*pearson coefficient of correlation* < 0,05). Dengan demikian model ini memenuhi atribut validitas prediksi. Dalam hal validitas konvergen, model Ritonga menunjukkan pergerakan nilai perhitungan akhir (indeks komposit) yang sejalan dengan hasil model lain dari Kloha (2005). Model ini juga mampu membedakan objek-objek yang dianalisis dengan model

yang lain sehingga memenuhi kriteria validitas konkruen.

Kelebihan lain dari model Ritonga yakni kemudahan dalam penggunaan sumber data dan bersifat homogen, yang didapat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Model ini juga turut menyesuaikan perkembangan basis pencatatan akuntansi di Indonesia. Selanjutnya model ini membangun hasil akhir dengan indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah sehingga mudah untuk dipahami.

Ritonga dkk. (2014) mengembangkan model pengukuran kondisi keuangan berdasarkan argumen bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan implikasi keuangan dari kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat mensyaratkan adanya kemampuan untuk menjalankan hak-hak keuangannya secara efisien dan efektif dan kemampuan memenuhi semua kewajiban keuangan kepada para pemangku kepentingan. Kemampuan pemerintah daerah menjalankan hak-hak dan kewajibannya tersebut diformulasikan ke dalam enam dimensi pengukuran meliputi: solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas operasional, fleksibilitas keuangan, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan.

1. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas keuangan jangka pendek berkaitan dengan likuiditas dan efektifitas pengelolaan kas. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan organisasi dalam menghasilkan sumber daya keuangan yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (Wang, 2007). Kewajiban pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pelaporan ditunjukkan pada segmen kewajiban lancar dalam neraca. Sedangkan sumber daya yang tersedia dan dapat digunakan dalam satu tahun ditunjukkan dalam segmen aktiva lancar. Solvabilitas jangka pendek dihitung dengan formula berikut.

$$\begin{aligned} \text{Rasio A} &= (\text{Kas \& Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek}) / \text{Kewajiban Lancar} \\ \text{Rasio B} &= (\text{Kas \& Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang}) / \text{Kewajiban Lancar} \\ \text{Rasio C} &= \text{Aktiva Lancar} / \text{Kewajiban Lancar} \end{aligned}$$

2. Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas keuangan jangka panjang mengindikasikan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban keuangan jangka panjang (Nollenberger dkk., 2003). Pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya hanya jika memiliki kecukupan aset yang didanai dari sumber daya sendiri dan juga ekuitas dana investasinya. Solvabilitas jangka panjang dapat dicerminkan dari rasio berikut.

<p>Rasio A = Total Aset Tetap / Kewajiban Jangka Panjang</p> <p>Rasio B = Total Aset / Total Kewajiban</p> <p>Rasio C = Ekuitas Dana Investasi / Total Kewajiban</p>
--

3. Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dalam rangka mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan (Nollenberger dkk., 2003). Indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasionalnya selama satu periode. Solvabilitas anggaran pemerintah daerah dapat ditunjukkan dari rasio-rasio sebagai berikut:

<p>Rasio A = (Total pendapatan LRA - Pendapatan dana alokasi khusus LRA) / (Total Belanja - Belanja modal)</p> <p>Rasio B = (Total pendapatan LRA - Pendapatan dana alokasi khusus LRA) / Belanja Operasional</p> <p>Rasio C = (Total pendapatan LRA - Pendapatan dana alokasi khusus LRA) / Belanja Pegawai</p> <p>Rasio D = Total pendapatan LRA / Total Belanja</p>
--

Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut mengindikasikan kondisi solvabilitas anggaran yang semakin baik. Dalam arti pemerintah daerah memiliki pendapatan yang semakin banyak untuk mendanai belanja operasionalnya.

4. Solvabilitas Operasional

Solvabilitas Operasional juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dalam rangka mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan. Perbedaan keduanya yakni Solvabilitas Anggaran berbasis pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan Solvabilitas Operasional berbasis pada Laporan Operasional (LO). Solvabilitas Operasional diperlukan dalam rangka menyesuaikan perubahan basis akuntansi *Cash Toward Accrual* (CTA) ke basis akuntansi akrual. Solvabilitas operasional diukur dengan rasio-rasio sebagai berikut.

<p>Rasio A = (Total Pendapatan LO - Pendapatan dana alokasi khusus LO) / (Total Beban)</p> <p>Rasio B = (Total Pendapatan LO - Pendapatan dana alokasi khusus LO) / (Beban Operasional)</p> <p>Rasio C = (Total Pendapatan LO - Pendapatan dana alokasi khusus LO) / (Beban Pegawai)</p> <p>Rasio D = (Total Pendapatan LO) / (Total Beban)</p>

5. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah kondisi di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014). Indikator ini harus dapat menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang

pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Dengan demikian, dimensi fleksibilitas keuangan dapat diformulasikan dalam rasio-rasio berikut.

$$\begin{aligned} \text{Rasio A} &= (\text{Total pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK LRA} - \text{Belanja Pegawai}) / (\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai}) \\ \text{Rasio B} &= (\text{Total pendapatan LRA} - \text{Pendapatan DAK LRA}) / (\text{Total Kewajiban} + \text{Belanja Pegawai}) \\ \text{Rasio C} &= (\text{Total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO} - \text{Beban Pegawai}) / (\text{Total Kewajiban} + \text{Beban Pegawai}) \\ \text{Rasio D} &= (\text{Total pendapatan LO} - \text{Pendapatan DAK LO}) / (\text{Total Kewajiban} + \text{Beban Pegawai}) \end{aligned}$$

6. Solvabilitas Layanan

Ritonga (2014) mengembangkan ukuran solvabilitas layanan berdasarkan definisi solvabilitas tingkat layanan yang diajukan Wang dkk. (2007), yakni kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Informasi terkait kemampuan pemerintah daerah untuk melayani masyarakat ini tercermin dari nilai aset dalam laporan neraca atau dari jumlah belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ritonga, 2014). Pengukuran rasio-rasio dimensi solvabilitas layanan dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio A} &= (\text{Total Aset}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \\ \text{Rasio B} &= (\text{Total Aset Tetap}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \\ \text{Rasio C} &= (\text{Total ekuitas}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \\ \text{Rasio D} &= (\text{Total Belanja LRA}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio E} &= (\text{Total Belanja Modal LRA}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \\ \text{Rasio F} &= (\text{Total Beban dan Transfer LO}) / (\text{Jumlah Penduduk}) \end{aligned}$$

7. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber nasional maupun internasional (CICA, 1997). Dimensi kemandirian keuangan menunjukkan *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (DJPK, 2012). Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (UU No. 23 Tahun 2014). Rasio-rasio dimensi kemandirian keuangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio A} &= (\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}) / (\text{Total Pendapatan LRA}) \\ \text{Rasio B} &= (\text{Total Pendapatan Asli Daerah LRA}) / (\text{Total Belanja}) \\ \text{Rasio C} &= (\text{Total Pendapatan Asli Daerah LO}) / (\text{Total Pendapatan LO}) \\ \text{Rasio D} &= (\text{Total Pendapatan Asli Daerah LO}) / (\text{Total Beban}) \end{aligned}$$

Ketergantungan pemerintah daerah atas pendanaan dari pemerintah pusat akan semakin berkurang seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Dengan demikian, semakin meningkat nilai kedua rasio

tersebut, semakin baik pula kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis kondisi keuangan pemerintah daerah sudah cukup banyak dilakukan. Pada umumnya penelitian yang ada berkaitan dengan pengembangan model pengukuran. Pada penelitian ini, penulis hanya menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relatif masih baru.

Ritonga (2014) mengembangkan konsep penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah dan mengimplementasikannya dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa selama periode 2007 hingga 2010. Ritonga (2014) berhasil mengembangkan model pengukuran dengan menggunakan enam dimensi pengukuran dan sembilan belas indikator.

Prita (2015) melakukan analisis kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator yang digunakan oleh DJPK dan memanfaatkan klaster yang telah dibangun oleh Priyambodo dan Ritonga (2014). Penelitian tersebut mengambil objek pemerintah daerah se-Jawa dan Bali selama periode 2010-2013. Salah satu kelemahan penelitian ini ialah indikator yang digunakan hanya menekankan pada laporan LRA saja. Hal ini mengakibatkan indikator yang digunakan dianggap kurang komprehensif.

Natrini (2016) melakukan pengembangan indikator kondisi keuangan model Brown (1993) dengan memodifikasinya sesuai dengan kondisi pemerintahan di Indonesia. Dengan 10 indikator yang dipadukan dengan teknik klaster Baidori (2015), peneliti melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa dan Bali selama periode 2013-2014.

Kaldani (2016) melakukan pengukuran kesehatan fiskal dalam konteks pemerintahan di Amerika Serikat. Berdasarkan Laporan keuangan tahunan selama periode 2008/2009 hingga 2013/2014, peneliti melakukan pemeringkatan kinerja relatif pemerintah. Pemeringkatan dilakukan dengan menghitung rasio saldo anggaran, rasio fleksibilitas aset, dan rasio pendanaan pensiun. Keterbatasan penelitian ini ada pada data yang tidak seutuhnya tersedia, sehingga daya banding kondisi keuangan antarpemerintah juga tidak optimal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2014).

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, dan membuat perbandingan atau evaluasi (Suwadji, 2012).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi. Adapun dokumen dalam penelitian ini berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kalimantan tahun 2011-2015. Dokumen tersebut mencakup laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Dari laporan tersebut, penulis memilah akun-akun yang dipertimbangkan sebagai indikator dalam pengukuran kondisi keuangan berdasar enam dimensi yang dikembangkan Ritonga (2012). Data lain yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik terutama terkait dengan jumlah penduduk.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap 1: Menentukan kelompok acuan (*benchmark*) pemerintah daerah yang setara. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan fairness dan daya banding

antarpemerintah daerah. Pengelompokan pemerintah daerah dapat dilakukan berdasarkan kesamaan jenis layanan yang diberikan, area, jumlah populasi, dan kepadatan penduduk sehingga daya bandingnya dapat dimaksimalkan (Zafra-Gómez dkk., 2009; Rivenbark dkk., 2010). Pengelompokan pemerintah daerah yang setara juga dapat meningkatkan kualitas indeks komposit yang dibuat (Ritonga, 2014).

Tahap 2: Menghitung indeks indikator

Penghitungan indeks indikator perlu dilakukan karena nilai satuan dimensi dan indikator kondisi keuangan antarpemerintah daerah berbeda-beda (Santos, 1999). Perbedaan tersebut misalnya rasio A menggunakan satuan "jumlah uang per penduduk" dan rasio B menggunakan satuan "kali". Apabila sebelum menghitung angka indeks ditemui adanya variasi data yang ekstrim, maka diperlukan transformasi data. Transformasi data pada umumnya dilakukan dalam bentuk eksponen, logaritma, atau bentuk lain. Indeks indikator dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{nilai aktual} - \text{nilai minimum})}{(\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})}$$

Tahap 3: Menghitung indeks dimensi.

Indeks dimensi merupakan nilai rata-rata aritmatik dari indeks indikator. Rata-rata aritmatik dipilih karena lebih memberikan hasil yang lebih adil dari pada rata-rata geometrik. Dalam menghitung indeks dimensi,

penulis mengasumsikan masing-masing indeks indikator memiliki bobot yang sama. Berikut merupakan formula dalam menghitung indeks dimensi.

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{(I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-2}} + \dots + I_{\text{indikator-n}})}{n}$$

I = indeks indikator; n = jumlah indikator

Tahap 4: Menghitung indeks komposit

Indeks komposit keuangan daerah merupakan rata-rata tertimbang dari indeks dimensi yang membentuknya (Ritonga, 2014). Penghitungan indeks komposit dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{FCI} : w_1 * DI_1 + w_2 * DI_2 + \dots + w_n * DI_n$$

FCI = Indeks kondisi keuangan (IKK)

w = bobot indeks masing-masing dimensi

DI = indeks dimensi

n = jumlah dimensi.

Adapun bobot setiap dimensi penyusun kondisi keuangan untuk Tahun 2011 sampai dengan 2014 mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dkk. (2012) sebagai berikut.

Dimensi	Bobot
Solvabilitas jangka pendek	0,206
Solvabilitas jangka panjang	0,245
Solvabilitas anggaran	0,142
Solvabilitas layanan	0,107
Fleksibilitas keuangan	0,175
Kemandirian keuangan	0,125
Total	1,000

Adapun untuk tahun 2015, pembobotan dimensi mengalami penyesuaian karena

adanya tambahan dimensi operasional. Oleh karena belum adanya penelitian khusus terkait bobot dimensi yang baru, dalam penelitian ini semua bobot diasumsikan sama. Dengan demikian penghitungan IKK untuk tahun 2015 yakni sebagai berikut.

$$\text{IKK} = \Sigma \text{Indeks Dimensi} / 7$$

Pemeringkatan Kondisi Keuangan

Berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah, penulis akan menyusun peringkat dari pemerintah daerah dengan nilai yang tertinggi hingga pemerintah daerah dengan nilai yang terendah. Pemeringkatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kondisi keuangan relatif antar pemerintah daerah di Kalimantan.

Hasil pemeringkatan tersebut kemudian akan dibagi kedalam tiga kategori sebagaimana pengkategorian yang dilakukan Ritonga (2014) yakni “sehat”, “cukup sehat”, dan “kurang sehat”. Pengkategorian dilakukan dengan menggunakan distribusi normal. Kondisi keuangan pemerintah daerah disebut "sehat" apabila hasil indeks komposit kondisi keuangannya mempunyai nilai lebih besar +1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan. Kondisi keuangan pemerintah daerah disebut “cukup sehat” apabila hasil dari indeks komposit kondisi keuangannya mempunyai nilai -1 sampai dengan +1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan. Sedangkan kondisi keuangan pemerintah daerah disebut

"kurang sehat" apabila indeks komposit kondisi keuangan mempunyai nilai kurang dari -1 standar deviasi dari rata-rata nilai indeks komposit kondisi keuangan.

Selanjutnya deskripsi karakteristik akan dilakukan pada tiga pemerintah daerah dengan indeks komposit kondisi keuangan terbaik dan tiga pemerintah daerah dengan indeks komposit kondisi keuangan terburuk. Dalam mendeskripsikan kondisi keuangan, akan menggunakan teori permintaan dan penawaran yang dapat berlaku pada pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan Ohls dan Wales (1972); Hyman (1990) dalam Ritonga (2014). Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondisi keuangan menurut Ritonga (2014), yaitu: (1) jumlah penduduk, (2) profil umur masyarakat, (3) kemakmuran masyarakat, (4) kepadatan penduduk, (5) basis pendapatan pemerintah daerah, (6) efisiensi keuangan, (7) biaya barang dan jasa.

Validitas Data

Validitas data digunakan peneliti untuk menguji akurasi temuan dengan menggunakan metode sebagaimana dinyatakan oleh Creswell (2014) antara lain dengan *peer debriefing*, yaitu meminta bantuan orang lain untuk membantu menelaah dan bertanya mengenai penelitian sehingga pemahamannya selaras dengan peneliti. Adapun sebagai *peer debriefer* yakni dosen pembimbing dan mahasiswa Magister Akuntansi konsentrasi Akuntansi Sektor Publik khususnya dengan

topik penelitian yang serupa. Validitas data juga dilakukan dengan memeriksa kebenaran penjumlahan ke bawah (*footing*) dan kebenaran penjumlahan ke samping (*cross-footing*) baik pada laporan keuangan (*on face*) maupun pada hasil perhitungan rasio. Adapun teknis yang dilakukan yakni dengan memanfaatkan fasilitas dalam program excel misalnya fungsi aritmatik, fungsi *Vlookup*, maupun fasilitas pengecekan angka ganda (*duplicate value*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio dan Dimensi Kondisi Keuangan

Tidak setiap unsur rasio dapat dipenuhi oleh laporan keuangan pemda sehingga akan ada beberapa rasio keuangan yang tidak tersedia. Misalnya saja ketika pemda tidak memiliki hutang jangka panjang maka rasio solvabilitas jangka panjangnya akan bernilai tak terhingga. Untuk menghindari hal tersebut penulis mengasumsikan nilai akun yang tidak tersedia tersebut dengan nilai 1 (satu). Angka satu tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh aset yang dimiliki pemda dapat menjamin setiap rupiah hutang jangka panjangnya.

Selanjutnya dilakukan uji statistik deskriptif atas masing-masing rasio. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang akan dianalisis. Data dianggap normal apabila memiliki nilai *skewness* 0 dan *kurtosis* 3 (Sugiyono, 2010).

Hasil statistik deskriptif data rasio untuk ketiga level pemda menunjukkan kondisi yang sama yakni data tidak terdistribusi dengan normal. Hal ini terlihat dari nilai *skewness* dan *kurtosis* masing-masing rasio tersebut yang tidak bernilai 0 dan 3 (lampiran 1). Data dianggap normal apabila memiliki nilai *skewness* 0 dan *kurtosis* 3 (Sugiyono, 2010). Dengan demikian, nilai yang tepat untuk merepresentasikan populasi ialah nilai median (Kamnikar dkk, 2006 dalam Ritonga, 2014).

1. Solvabilitas Jangka Pendek

Pada level pemerintah kabupaten, ketiga rasio solvabilitas jangka pendek menunjukkan tren menurun yang cukup signifikan. Rasio A sebesar 164,941 pada tahun 2011 turun menjadi 14,669 pada tahun 2015. Kondisi yang sama juga diikuti oleh Rasio B dan Rasio C. Berdasarkan data riil, dalam kurun 2011 s.d 2015 total hutang jangka pendek pemkab di Kalimantan naik hingga 84,63 persen yakni dari Rp337,3 miliar naik menjadi Rp2,2 triliun. Sementara di sisi lain kepemilikan kas dan setara kas pemda hanya tumbuh 3,17 persen yakni dari Rp7,3 triliun menjadi Rp7,6 triliun. Kenaikan hutang jangka pendek yang tidak diimbangi kenaikan kepemilikan aset lancar mengakibatkan solvabilitas jangka pendek pemda di Kalimantan menurun. Namun demikian, besaran rasio ini masih menunjukkan angka yang cukup wajar. Dalam arti pemerintah daerah masih memiliki kemampuan untuk

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Dalam konteks manajemen kas, penurunan rasio solvabilitas mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perbaikan terhadap pengelolaan aset lancarnya. Yakni aset lancar yang menganggur telah dioptimalkan penggunaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan.

Tren rasio solvabilitas jangka pendek yang menurun juga terjadi pada level pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Semua rasio solvabilitas jangka pendek pemerintah kota mengalami tren menurun. Penurunan angka rasio ini dapat menjadi indikasi perbaikan pengelolaan aset lancar pemerintah daerah. Namun jika terus mengalami penurunan bahkan hingga di bawah nilai 1 dapat dipastikan pemerintah kota akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika hal ini dibiarkan tentunya akan mempengaruhi kemampuan pemda dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

Tren menurun rasio solvabilitas jangka pendek pemerintah provinsi terjadi sejak tahun 2012. Bahkan untuk tahun 2015 rasio A sebesar 0,526. Kondisi ini patut menjadi perhatian pemerintah daerah karena terdapat kewajiban jangka pendek yang terancam tidak dapat dilunasi. Dengan kata lain, pemerintah daerah mengalami kekurangan dana lancarnya

untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo pada tahun anggaran.

Pemerintah daerah dengan indeks dimensi solvabilitas jangka pendek tertinggi tahun 2015 disetiap level yakni Pempov Kalimantan Utara, Pemkab Barito Timur, dan Pemkot Palangka Raya.

2. Solvabilitas Jangka Panjang

Pada level pemerintah kabupaten, Rasio A memiliki kecenderungan meningkat meskipun sedikit menurun ditahun 2015. Peningkatan rasio ini seiring dengan pertumbuhan kepemilikan aset tetap Pemkab di Kalimantan yang cukup signifikan. Berdasarkan data LHP, nilai rata-rata aset tetap Pemkab di Kalimantan selama kurun 2011 s.d 2015 meningkat sebesar Rp793 miliar atau 35,6 persen. Sementara di sisi lain, kewajiban jangka panjang rata-rata Pemkab justru mengalami penurunan dari Rp2,9 miliar menjadi Rp1,7 miliar atau 64,2 persen. Kondisi ini memicu tren meningkat pada Rasio A. Adanya sedikit penurunan Rasio A di tahun 2015 disebabkan Pemkab telah memberlakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Hal ini sebagai konsekuensi perubahan basis akuntansi *Cash Toward Accrual* menuju basis akrual.

Selanjutnya Rasio B dan C selama kurun waktu 2011 s.d 2015 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif. Namun demikian, secara umum Pemkab di Kalimantan memiliki kecukupan aset dan ekuitas yang mampu menjamin kewajiban jangka panjangnya.

Sebagai contoh untuk tahun 2015, Rasio B dan C Pemkab di Kalimantan yakni 207,534 dan 206,534. Hal ini menunjukkan setiap Rp1 hutang jangka panjang dijamin dengan Rp207,534 aset dan Rp206,534 ekuitas dana investasi yang dimiliki pemda.

Pada level pemerintah kota, ketiga rasio juga menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pemerintah kota memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Di sisi lain, pada level pemerintah provinsi tren ketiga rasio solvabilitas jangka panjang cukup fluktuatif.

Pemerintah daerah dengan indeks dimensi solvabilitas jangka panjang tertinggi tahun 2015 disetiap level yakni Pempov Kalimantan Timur, Pemkab Lamandau, dan Pemkot Balikpapan.

3. Solvabilitas Anggaran

Pada umumnya Pemkab di Kalimantan memiliki rasio A, B, dan D yang cenderung menurun selama rentang waktu 2011 s.d 2015. Hanya rasio C yang kecenderungannya naik meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014. Nilai Rasio A, B, dan D tahun 2011 masing-masing 1,373; 1,449. dan 1,068 turun menjadi 1,245; 1,393; dan 0,976 di tahun 2015. Tren yang menurun menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran pemerintah kabupaten dari sisi pendapatan, melemah.

Kecenderungan menurun rasio-rasio tersebut menjadi peringatan dini bagi pemda terkait kemampuannya dalam membiayai

kegiatan operasional. Apabila kondisi ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan kegiatan operasional pemda akan terhambat karena terjadinya defisit anggaran.

Sementara rasio solvabilitas anggaran level pemerintah kota selama kurun tahun 2011 s.d 2015 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kondisi yang cukup beresiko terjadi pada tahun 2013 dan 2015 yakni pemda mengalami kesulitan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Hal ini ditunjukkan dari nilai Rasio D yang berada di bawah 1. Namun demikian nilai rasio yang lain yakni Rasio A, B, dan C menunjukkan bahwa secara umum pemda masih mampu mendanai kegiatan operasionalnya.

Di sisi lain, tren rasio A dan B pemprov di Kalimantan secara umum mengalami penurunan. Berdasarkan data LRA, dalam kurun 2011 s.d 2015, rata-rata total pendapatan selain pendapatan DAK naik sebesar Rp264,9 miliar atau 6,3 persen. Sementara Total Belanja diluar belanja modal naik hingga Rp1.190 miliar atau 43,7 persen. Kenaikan total belanja yang tidak diimbangi kenaikan pendapatan mengakibatkan solvabilitas anggaran pemda provinsi melemah.

Meskipun besaran rasio tersebut menunjukkan pemda masih mampu mendanai belanjanya, namun kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih. Tidak menutup kemungkinan, menurunnya kemampuan pendapatan untuk

mendanai operasional pemda anak berujung pada masalah yang lebih serius. Hal ini dikarenakan defisit operasi merupakan awal terjadinya kesulitan keuangan di masa depan (Kloha dkk., 2005).

Pemerintah daerah dengan indeks dimensi solvabilitas anggaran tertinggi tahun 2015 disetiap level yakni Pempov Kalimantan Timur, Pemkab Kutai Barat, dan Pemkot Pontianak.

4. Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional hanya ada di tahun 2015 yakni dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi akrual. Dengan demikian trend solvabilitas operasional tidak dapat disajikan.

Pada level pemerintah kabupaten, Pemkab Kutai Barat memiliki pendapatan diluar DAK di atas rata-rata pemda lain sementara beban pegawainya lebih kecil dari rata-rata pemda lain. Pendapatan di luar DAK Pemkab Kutai Barat yakni Rp.2.184 miliar dengan rata-rata pemda Rp1.328 miliar. Sementara beban pegawainya Rp411 miliar dengan rata-rata pemda Rp468,5 miliar. Dengan demikian solvabilitas operasional Pemkab Kutai Barat dari sisi pemenuhan beban pegawai lebih baik dibandingkan pemda lainnya.

Pada level pemerintah kota, Pemkot Palangka Raya merupakan pemda dengan rasio A dan B yang tertinggi di antara pemda lain di Kalimantan yakni masing-masing 1,289 dan 1,293. Sedangkan Rasio C tertinggi dicapai oleh Pemkot Bontang yakni 2,790 dan

Rasio D tertinggi dicapai oleh Pemkot Banjarbaru yakni 1,370. Berdasarkan data LHP 2015, Pemkot Palangka Raya memiliki pendapatan di luar DAK sebesar Rp1.084 miliar dengan rata-rata pemkot Rp1.450 miliar. Sementara total beban Pemkot Palangka Raya jauh di bawah rata-rata pemkot yakni sebesar Rp847 miliar dengan rata-rata pemkot Rp1.368 miliar. Dengan demikian solvabilitas operasional dari sisi pendapatan Pemkot Palangka Raya dapat unggul dibanding pemda lain.

Hasil perhitungan rasio solvabilitas operasional level pemerintah provinsi yang tertinggi yakni Pemprov Kalimantan Selatan untuk Rasio A,B, dan D masing-masing 1,120; 1,120 dan 1,135. Sementara untuk rasio C tertinggi dicapai oleh Pemprov Kalimantan Utara. Secara umum, untuk tahun 2015 tidak ada pemerintah provinsi yang rasio solvabilitas operasionalnya di bawah angka 1. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi di Kalimantan secara umum mampu membiayai kegiatan pemda, baik terkait beban pegawai maupun beban operasional lainnya.

5. Fleksibilitas Keuangan

Pada level pemerintah kabupaten, Fleksibilitas keuangan secara umum menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas fleksibilitas keuangan pemda. Artinya pemerintah kabupaten memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengantisipasi

kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang. Secara geografis, pemerintah kabupaten di Kalimantan relatif memiliki risiko bencana alam yang lebih rendah dibanding , pemerintah kabupaten lain yang berada pada jalur ring of fire. Namun demikian, pengalaman masa lalu atas konflik sosial di Kalimantan patut menjadi pelajaran sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa depan.

Tren fleksibilitas keuangan level pemerintah kota cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Bahkan pada tahun 2015, Rasio A (total pendapatan-dana alokasi khusus-belanja pegawai) / (total kewajiban +belanja pegawai) berada pada angka 0,887. Hal ini menunjukkan bahwa pemda memiliki kualitas fleksibilitas keuangan yang tidak memadai.

Fleksibilitas keuangan pemerintah provinsi juga memiliki tren yang cukup fluktuatif. Namun demikian kondisi tahun 2015 masih lebih baik dari tahun 2011. Tahun 2011 nilai Rasio A dan B masing-masing 3,088 dan 3,875, sedangkan pada tahun 2015 kondisi fleksibilitas keuangan masih lebih baik tahun 2011 yakni 3.450 dan 4,166. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemda memiliki fleksibilitas keuangan sebesar 3,450 dan 4,166 kali untuk mengantisipasi kejadian luar biasa.

Pemerintah daerah dengan indeks dimensi fleksibilitas keuangan tertinggi tahun 2015 disetiap level yakni Pemkab Berau,

Pemkot Balikpapan, dan Pempov Kalimantan Utara.

6. Solvabilitas Layanan

Pada level pemerintah kabupaten, tren seluruh rasio solvabilitas layanan yang memiliki kecenderungan meningkat dalam kurun lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten memiliki komitmen untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Sebagai contoh, untuk Rasio A pada tahun 2011 pemerintah kabupaten memiliki aset senilai Rp6.886.418 untuk melayani setiap warganya. Dan tahun 2015 aset pemerintah kabupaten meningkat menjadi Rp9.978.585 untuk melayani setiap warganya.

Tren yang sama juga terjadi pada level pemerintah kota. Artinya pemerintah kota di Kalimantan juga memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Dari sisi belanja, pemerintah kota meningkatkan belanja dari yang sebelumnya sebesar Rp2.547.408 (tahun 2011) menjadi Rp3.985.445 (tahun 2015) untuk melayani setiap warganya.

Upaya pemerintah provinsi untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakatnya tampak dari meningkatnya nilai rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan ini tidak dapat dilihat baik atau buruknya karena belum ada batasan yang jelas tentang rasio ini. Namun semakin tinggi nilai solvabilitas layanan maka semakin baik pula

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi masyarakatnya (Ritonga, 2014).

Pemerintah daerah dengan indeks dimensi solvabilitas layanan tertinggi tahun 2015 disetiap level yakni Pemkab Tana Tidung, Pemkot Bontang, dan Pempov Kalimantan Timur.

7. Kemandirian Keuangan

Pada level pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, kemandirian keuangan yang secara umum memiliki tren yang meningkat. Rata-rata pemerintah kabupaten pada tahun 2011 memiliki Rasio A dan B masing-masing 4,3 persen dan 4,6 persen meningkat menjadi 5,9 dan 5,2 persen pada tahun 2015. Artinya pada tahun 2015, kontribusi PAD pemkab di Kalimantan terhadap total pendapatannya hanya 5,9 persen. Kendatipun setiap tahun tren kemandirian keuangan ini terus meningkat, rendahnya rasio kemandirian ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemkab-pemkab di Kalimantan terhadap dana transfer dan dana perimbangan masih terlalu tinggi. Hal ini dibuktikan pada tahun 2015 total dana transfer seluruh pemkab di Kalimantan mencapai Rp55.085 miliar. Di sisi lain, total PAD pemkab di Kalimantan hanya Rp4.013 miliar. Dengan demikian 90,47 persen pendapatan pemkab di Kalimantan masih ditopang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berbeda dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, tren kemandirian keuangan pemerintah provinsi justru menunjukkan tren yang menurun. Tahun 2011

sebesar 47,5 persen pendapatan daerah mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah itu sendiri dan pada tahun 2015 angka tersebut mengalami penurunan menjadi 41,8 persen. Dengan menurunnya angka rasio mengindikasikan bahwa ketergantungan pemda atas pembiayaan dari pemerintah pusat semakin meningkat.

Pemerintah daerah dengan indeks dimensi kemandirian keuangan tertinggi tahun 2015 disetiap level yakni Pemkab Tanah Laut, Pemkot Balikpapan, dan Pempov Kalimantan Selatan.

Pemeringkatan dan Pengkategorian

Untuk tahun 2015, pada level pemerintah kabupaten, tiga pemda terbaik secara berurutan yakni Pemkab Berau dengan IKK 0,504; Pemkab Sukamara dengan IKK 0,482; dan Pemkab Lamandau dengan IKK 0,462. Sedangkan tiga pemerintah daerah terlemah kondisi keuangannya yakni Pemkab Mempawah dengan IKK 0,209; Pemkab Sambas dengan IKK 0,177; dan Pemkab Bulungan dengan IKK 0,155. Dari hasil perhitungan IKK tersebut juga diketahui terdapat 6 pemkab dengan kondisi keuangan sehat, 34 pemkab dengan kondisi keuangan cukup sehat, dan 5 pemkab dengan kondisi keuangan kurang sehat.

Selanjutnya pada level pemerintah kota, tiga pemda terbaik yakni Pemkot Balikpapan dengan IKK 0,705; Pemkot Banjarbaru dengan IKK 0,619; dan Pemkot

Pontianak dengan IKK 0,594. Sedangkan tiga pemda dengan peringkat terendah yakni Pemkot Singkawang dengan IKK 0,304; Pemkot Banjarmasin dengan IKK 0,290; dan Pemkot Tarakan dengan IKK 0,146. Dari 9 pemerintah kota di Kalimantan, 2 diantaranya memiliki kondisi keuangan yang sehat, 6 pemkot berkategori cukup dan 1 pemkot dengan kondisi keuangan kurang.

Pada level pemerintah provinsi, pemda dengan IKK tertinggi yakni Pemprov Kalimantan Timur dengan IKK 0,689. Disamping memiliki IKK tertinggi, Pemprov Kalimantan Timur juga merupakan satu-satunya pemprov di Kalimantan yang sehat kondisi keuangannya. Tiga pemprov termasuk dalam kategori cukup sehat kondisi keuangannya yakni Pemprov Kalimantan Utara, Pemprov Kalimantan Selatan, dan Pemprov Kalimantan Barat. Sedangkan pemda dengan IKK terendah yakni Pemprov Kalimantan tengah dengan IKK 0,216. Dengan nilai IKK tersebut, Pemprov Kalimantan Tengah termasuk dalam kategori kurang sehat kondisi keuangannya.

Dalam kurun 2011 s.d 2015 terdapat beberapa pemda yang konsisten menempati posisi tertinggi kondisi keuangannya dilihat dari Indeks Kondisi Keuangannya. Dua pemerintah provinsi yang selalu menempati posisi tiga tertinggi IKKnya yakni Pempro Kalimantan Timur dan Pemprov Kalimantan Selatan. Untuk level pemerintah kota hanya Pemkot Bontang yang konsisten menempati

posisi lima tertinggi indeks kondisi keuangannya. Sedangkan untuk level pemerintah kabupaten, satu-satunya Pemkab yang konsisten menempati posisi lima tertinggi IKK-nya yakni Pemkab Berau.

Analisis Karakteristik Kondisi Keuangan

Analisis karakteristik di sini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Identifikasi analisis ditujukan bagi tiga pemerintah daerah dengan peringkat kondisi keuangan tertinggi dan tiga pemerintah daerah terendah.

1. Tingkat Kemakmuran

Tingkat kemakmuran diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Hasil identifikasi terhadap kemakmuran penduduk menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan penduduk yang lebih makmur cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Peningkatan kemakmuran ini akan menyediakan sumberdaya bagi pemda. Semakin sejahtera suatu masyarakat, maka akan semakin tinggi pendapatan pemda dari pajak, retribusi, dan cukai yang dapat dihasilkan (Nollenberger dkk., 2003).

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil identifikasi jumlah penduduk pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi cenderung lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk pemerintah daerah dengan peringkat terendah. Jumlah penduduk mendorong permintaan barang dan jasa yang

harus disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan belanja pemerintah daerah akan meningkat sehingga akan akan memperburuk kondisi keuangan pemerintah daerah dari sisi pengeluaran (Ritonga, 2014)

3. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin pada pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi rata-rata berjumlah 5.195 jiwa, sedangkan pada pemerintah daerah dengan peringkat rendah rata-rata 23.343 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk miskin akan menekan keuangan pemda dari sisi belanja. Dalam kondisi ini pemda dituntut untuk dapat menyediakan pelayanan ekstra seperti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pemberian subsidi, penambahan fasilitas kesehatan dan pengeluaran publik lainnya. Hal inilah yang akan berpotensi memperburuk kondisi keuangan pemda.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk pada pemerintah daerah dengan peringkat tertinggi cenderung lebih sedikit dari pada pemerintah daerah pada peringkat terendah. Hal ini berbeda dengan penelitian Carmeli (2008) dalam Ritonga (2014) yang menemukan bahwa pemerintah daerah yang besar memiliki kondisi keuangan yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang kecil. Kondisi keuangan yang lebih baik pada pemda dengan kepadatan penduduk rendah didukung oleh penyediaan pelayanan masyarakat yang masih terbatas. Sebagai contoh, beberapa kantor pelayanan masyarakat

belum tersedia di daerah kecamatan karena memang penduduk yang dilayani masih sedikit. Dengan demikian sumber daya yang disediakan pemda juga sedikit. Kondisi ini akan mengurangi tekanan sisi belanja pemerintah daerah.

5. Profil Umur Masyarakat

Antar pemda dengan peringkat IKK tertinggi dan IKK terendah tidak memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari profil usia produktifitas penduduknya. Kondisi ini berbeda dengan pendapat Nollenberger dalam Ritonga (2014) yang menyatakan bahwa kelompok penduduk usia muda dan tua atau kelompok non-produktif membutuhkan layanan dan barang yang berbeda dari populasi kelompok pekerja. Tidak berbedanya karakteristik usia penduduk misalnya disebabkan oleh keengganan masyarakat yang berusia lanjut memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, dan cenderung memilih pengobatan tradisional.

6. Biaya Barang dan Jasa

pemerintah kabupaten dengan kondisi keuangan tertinggi cenderung memiliki upah minimum yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dengan kondisi keuangan terendah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh peningkatan upah minimum kabupaten justru mendorong peningkatan transaksi barang dan jasa di daerah. Dengan demikian perekonomian berjalan lebih baik dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan retribusi juga meningkat. Hal ini yang

mendorong perbaikan kondisi keuangan pemerintah daerah.

7. Efisiensi Keuangan

Efisiensi keuangan dicerminkan dari prosentase belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah. Rata-rata persentase belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah kabupaten dengan IKK tertinggi cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dengan IKK terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi keuangan pemerintah kabupaten secara umum mempengaruhi kondisi keuangannya. Rendahnya belanja pegawai menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan belanjanya untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216).

2. Selama kurun 2011 s.d 2015, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang konsisten menempati lima tertinggi IKKnnya yakni pemerintah kabupaten Berau dan pemerintah kota Bontang. Sementara pemerintah provinsi yang konsisten menempati posisi tiga tertinggi IKKnnya yakni pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
3. Hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan IKK tertinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran dan efisiensi keuangan yang lebih baik, biaya barang dan jasa yang lebih tinggi, serta jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah dengan IKK terendah.

Keterbatasan dan Saran

1. Penelitian ini hanya berdasarkan klasterisasi sederhana sehingga daya banding antarpemda menjadi berkurang. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan klasterisasi berdasarkan metode yang lebih baik sehingga dihasilkan kelompok pemda dengan daya banding yang lebih baik pula.
2. Pemilihan metode dalam pengkategorian kondisi keuangan pemda dalam penelitian ini masih berdasarkan subjektivitas penulis yakni berdasarkan *mean* dan standar deviasi. Penelitian selanjutnya

dapat menggunakan metode lain yang lebih akurat dalam pengkategorisasian kondisi keuangan pemda sehingga dapat mencerminkan kondisi keuangan pemda yang sebenarnya.

3. Pembobotan dimensi dalam perhitungan IKK tahun 2015 masih berdasarkan alasan kepraktisan. Penelitian kedepan diharapkan dapat memformulasikan pembobotan ketujuh dimensi kondisi keuangan sehingga dihasilkan indeks kondisi keuangan yang lebih baik.
4. Saran untuk pemerintah daerah
 - a) Meningkatkan pengelolaan aset lancar dalam rangka penguatan kemampuan memenuhi kewajiban dengan tetap memperhatikan kewajaran kepemilikan aset lancar yang mengendap (*idle cash*).
 - b) Mendorong transaksi dan inovasi produk barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pemasaran pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah.
 - c) Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah agar tidak hanya berorientasi pencapaian opini laporan keuangan yang wajar namun terwujudnya kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

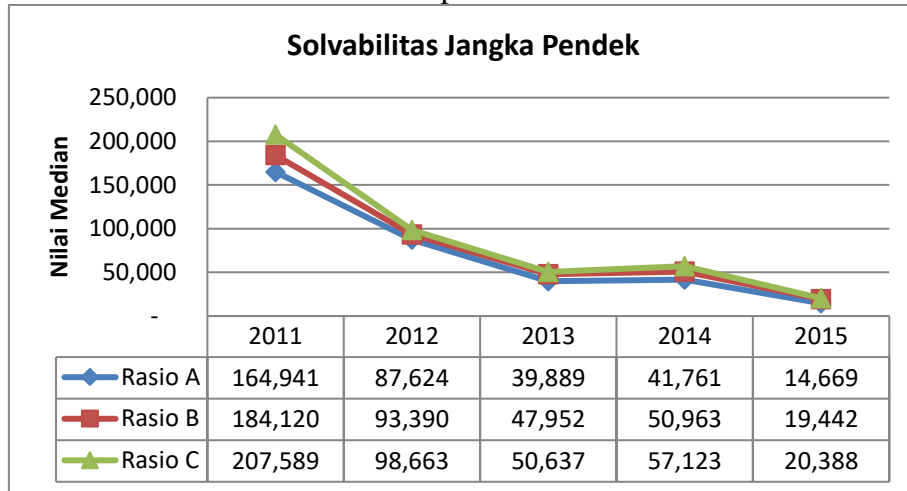
- Auzar, Z. 2015. Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Indonesia (2005-2010). Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. Indeks Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016.
- Baidori. 2015. Pengklasteran Pemerintah Daerah di Jawa dan Bali Berdasarkan Variabel Sosio ekonomi (Komparasi Laporan keuangan Daerah). Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Cabaleiro, R.1., Enrique, B., Antonio, V. 2012. Developing a Method to Assessing the Municipal Financial Health. *American Review of Public Administration* 43(6) 729-751
- Carmeli, A. 2008. The Fiscal Distress of Local Governments in Israel: Sources and Coping Strategies. *Administration & Society*. Vol. 39. No. 8. pp. 984- 1007.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. SAGE Publications Inc.
- DJPk. 2012. *Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Kaldani, D., Autumn, C., Eva K.Z., Jhanvi. A., Kimberly .A., Madhusudan. R., Jinhui. L. 2016. Developing a Framework for Ranking State and Municipal Governments on Fiscal Sustainability. *European Journal of Sustainable Development* (2016), 5, 3, 285-296
- Kloha, P., Carol, S.W., Kleine, R. 2005. Developing and Testing a Composite Model to Predict Local Fiscal Distress. *Public Administration Review*, vol.65, no.3, pp.313-323.
- Natrini, N.D dan Ritonga I. 2017. Design and Analysis of Financial Condition Local Government Java and Bali (2013-2014). *SHS Web of Conferences* 34. FourA 2016.
- Nollenberger, K., Groves, M.S., Valente, M.G. 2003. Evaluating Financial Condition: A Handbook for Local Government. *International City/County Management Association*. Washington, DC.
- Prita, A.D. 2015. Analisis Kondisi Keuangan Berdasarkan Model Brown. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Priyambodo, V.K. dan Ritonga, I. 2014. Pengklasteran Pemerintah Daerah untuk Memaksimalkan Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram*.
- Prokaltim. 2015. *APBD Kaltim Terus Turun, Anehnya Program Terus Tambah*. Tersedia di <http://kaltim.prokal.co/read/news/244388-apbd-kaltim-terus-turun-anehnya-program-terus-tambah>. Diakses 21 Maret 2017
- Prokaltim. 2017. *Pemerintah Putar Otak untuk Bayar Utang ke Kontraktor*. Tersedia di <http://kaltim.prokal.co/read/news/291438-pemerintah-putar-otak-untuk-bayar-utang-ke-kontraktor.html>. Diakses 21 Maret 2017
- Radarkaltim. 2016. *Utang Jamkesda se-Kaltim Rp153 miliar*. Tersedia di <http://radarkaltim.prokal.co/read/news/2717-utang-jamkesda-se-kaltim-rp-153-miliar.html>. Diakses 21 Maret 2017

- Ramsey, T.K. 2013. Measuring and evaluating the financial condition of local government. *Thesis. California State University*
- Ritonga, I., Clark, C., Wickremasinghe, G. 2012. Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: An Exploration. *Municipal and Public Finance, vol. 1, no. 2, pp. 37-50.*
- Ritonga, I. 2014. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta:Lembaga Kajian manajemen Pemerintah Daerah.
- Ritonga, I. 2014b. Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia. *International Journal of Governmental Financial Management - Vol. XIV, No 2,2014.p19-33*
- Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S. 2010. Conceptualizing Financial Condition in Local Government. *Jurnal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management, vol.22, no. 2, pp. 149-177.*
- Republik Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Rusmin, R., Astami, E.W., Scully, G. 2014. Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 8(2), P88-109.*
- Available at :
<http://ro.uow.edu.au/aabfj/vol8/iss2/7>
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta
- Suwadji, Y. 2012. *Pengantar Metopen.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syahrudin. 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi yang Konsisten.
- Tribunnews. 2016. *APBD Kaltim 2016 Resmi Disahkan, Turun Sebesar Rp 2,6.* Tersedia di <http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/26/apbd-kaltim-2016-resmi-disahkan-turun-sebesar-rp-26-triliun>. Diakses 21 Maret 2017
- Tribunnews. 2016. Defisit APBD Banjar Sudah Lampu Merah Bupati Masih Optimis. Tersedia di <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/26/defisit-anggaran-apbd-banjar-sudah-lampu-merah-bupati-masih-optimistis>. Diakses 21 Maret 2017
- Wang, X., Dennis, L., dan Tu, Y.S.J. 2007. Measuring financial condition: A Study of US states . *Public Budgeting & Finance, vol. 27, no. 2, pp. 1-21.*
- Zafra-Gómez, J.L., López-Hernández, A.M., Hernández-Bastida, A. 2009. Developing a Model to Measure Financial Condition in Local Government. *The American Review of Public Administration.* Vol. 39. No. 4. pp.425-449.

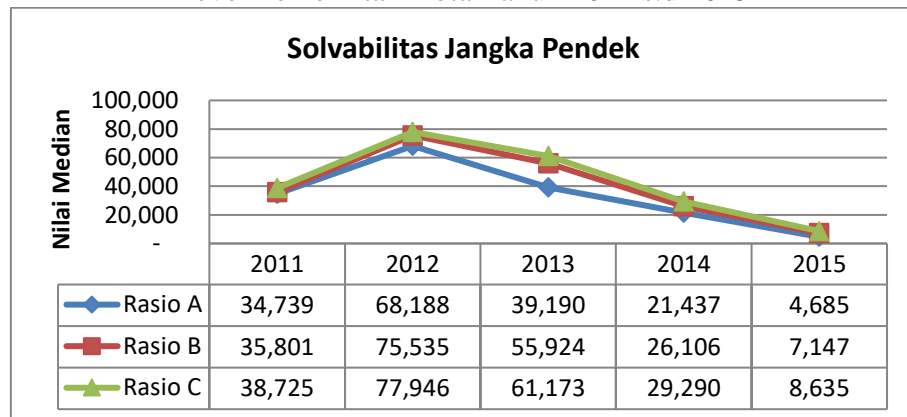
LAMPIRAN 1

TREN SOLVABILITAS JANGKA PENDEK

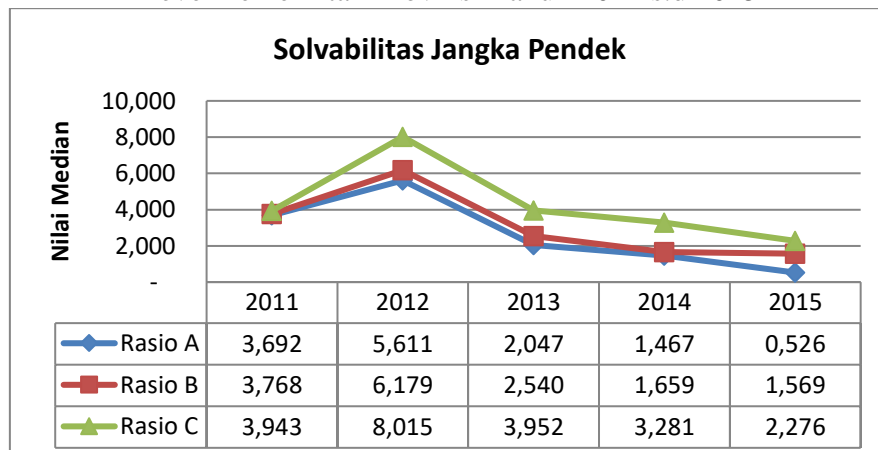
Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Jangka Pendek
Level Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Rasio Median Solvabilitas Jangka Pendek
Level Pemerintah Kota Tahun 2011 s.d 2015



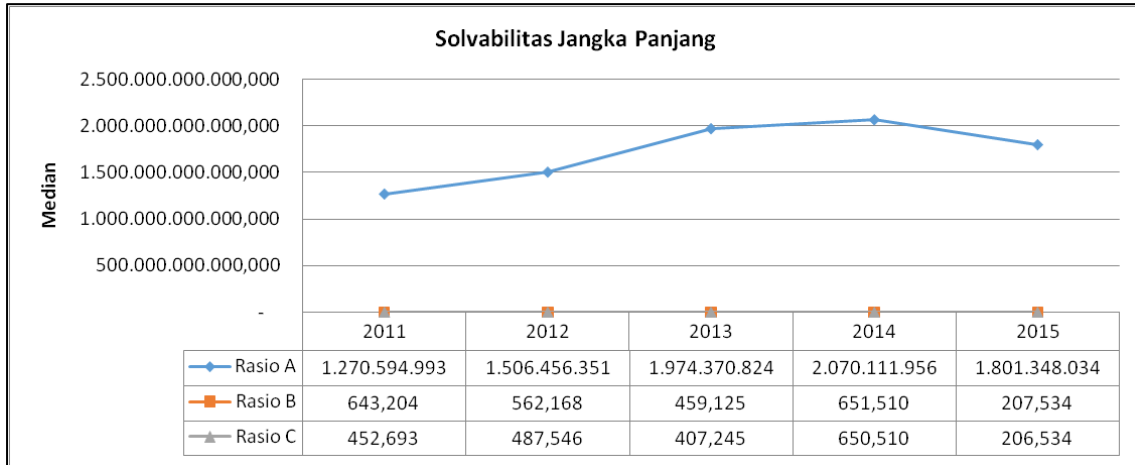
Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Jangka Pendek
Level Pemerintah Provinsi Tahun 2011 s.d 2015



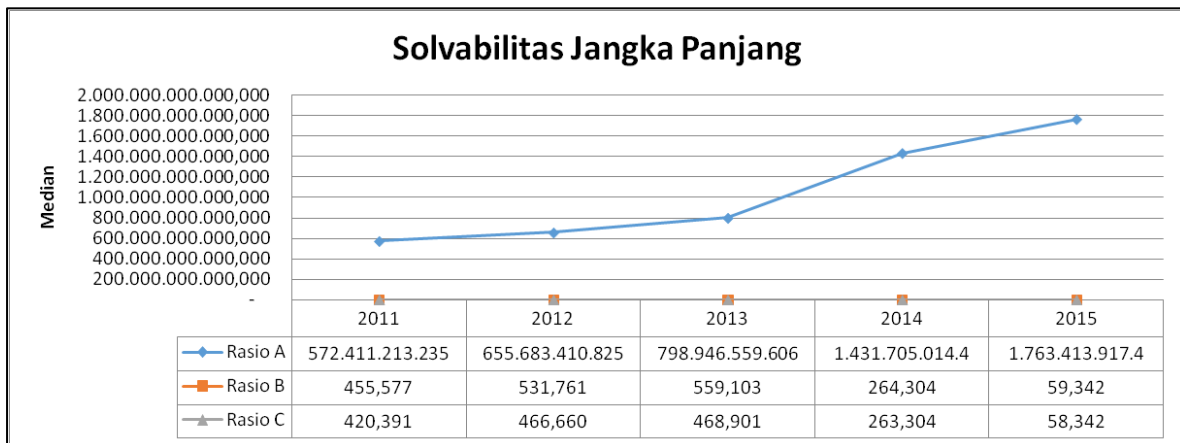
LAMPIRAN 2

TREN SOLVABILITAS JANGKA PANJANG

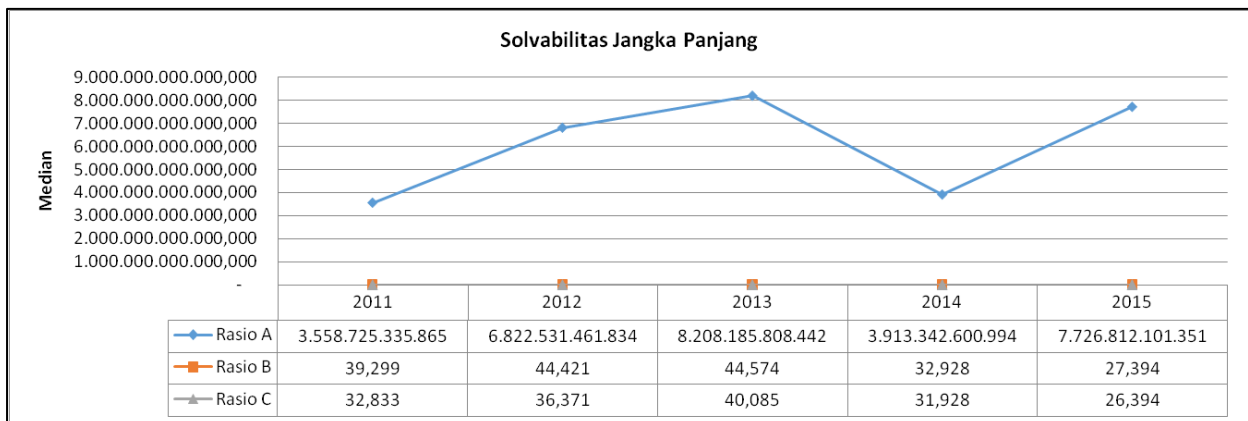
Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
Level Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
Level Pemerintah Kota Tahun 2011 s.d 2015



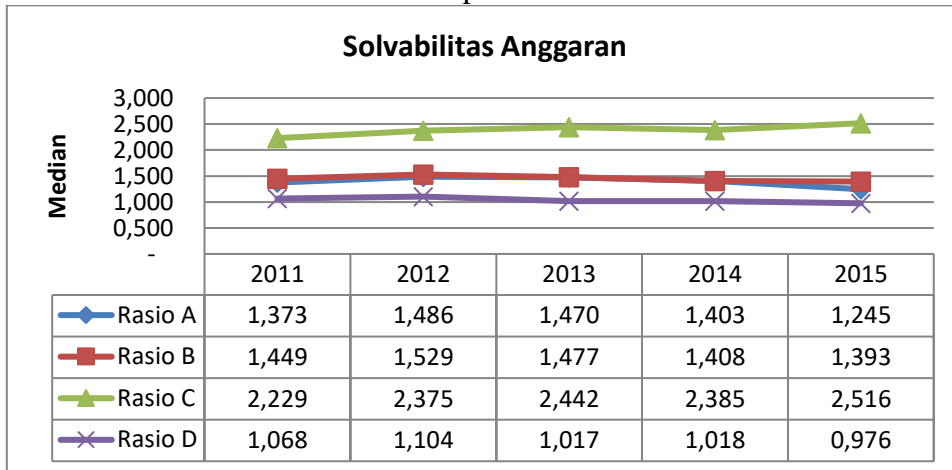
Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
Level Pemerintah Provinsi Tahun 2011 s.d 2015



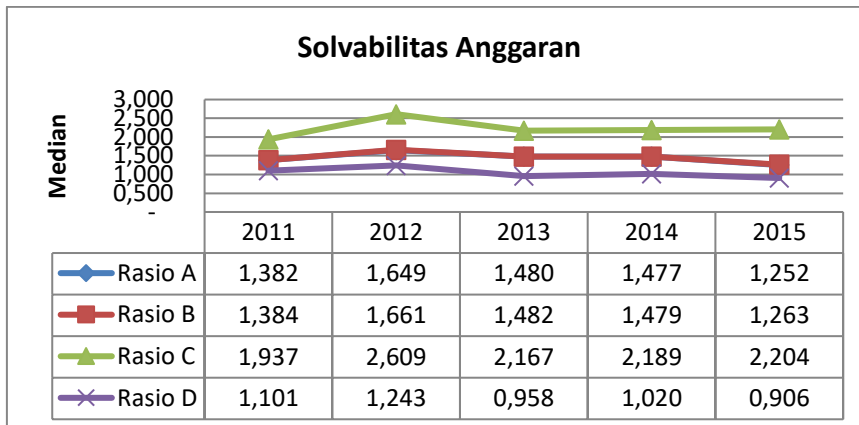
LAMPIRAN 3

TREN SOLVABILITAS ANGGARAN

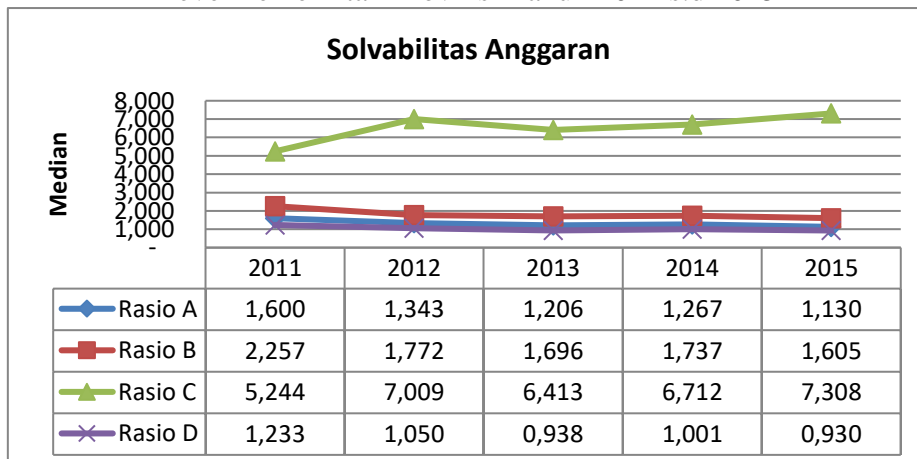
Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Anggaran
Level Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Anggaran
Level Pemerintah Kota Tahun 2011 s.d 2015



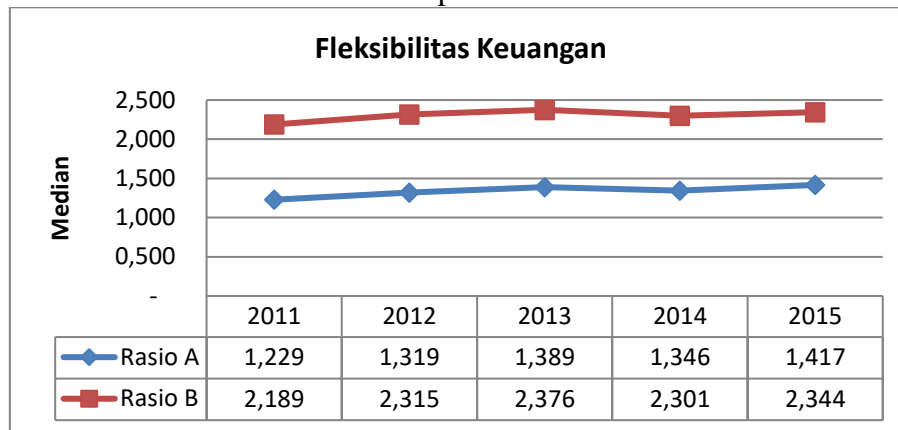
Tren Nilai Median Rasio Solvabilitas Anggaran
Level Pemerintah Provinsi Tahun 2011 s.d 2015



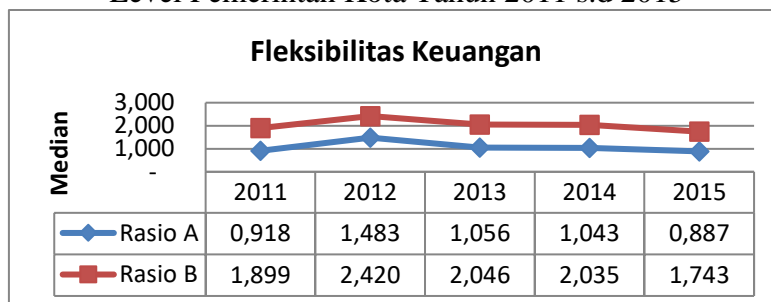
LAMPIRAN 4

TREN FLEKSIBILITAS KEUANGAN

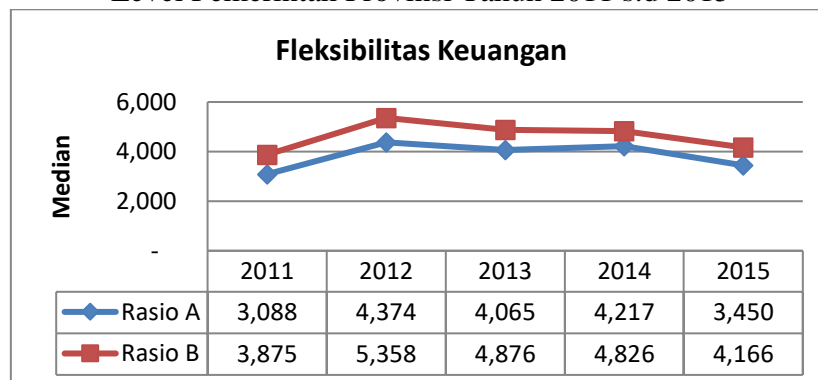
Tren Nilai Median Fleksibilitas Keuangan
Level Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Median Fleksibilitas Keuangan
Level Pemerintah Kota Tahun 2011 s.d 2015



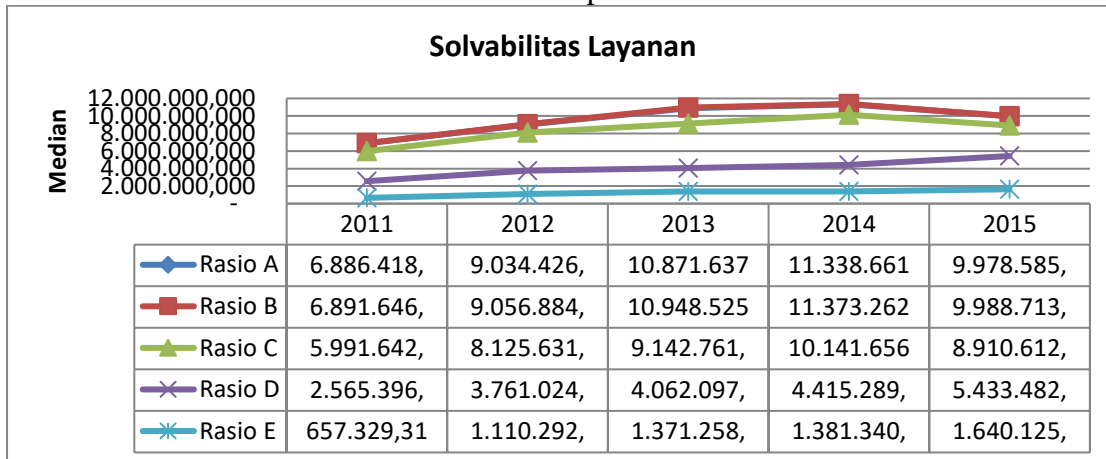
Tren Nilai Median Fleksibilitas Keuangan
Level Pemerintah Provinsi Tahun 2011 s.d 2015



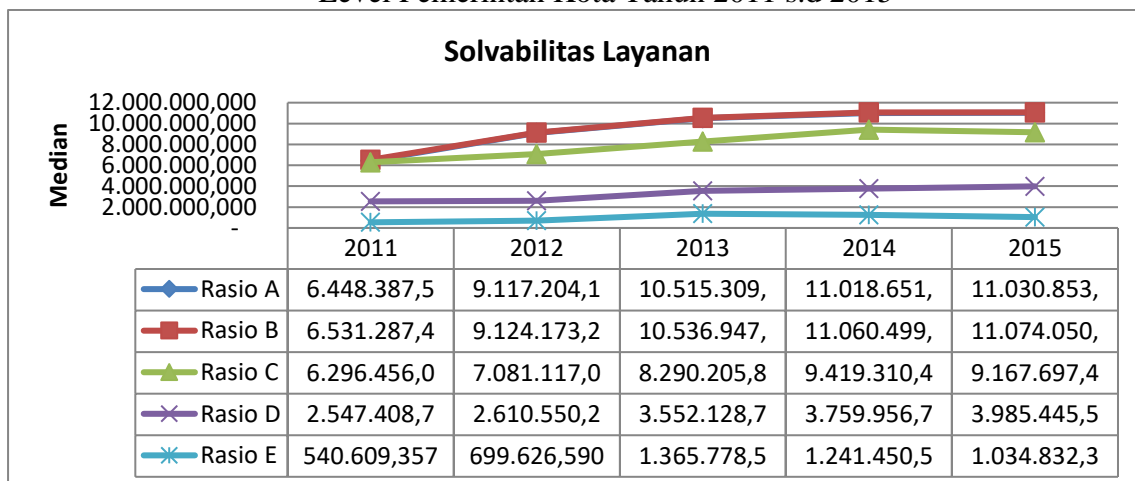
LAMPIRAN 5

TREN SOLVABILITAS LAYANAN

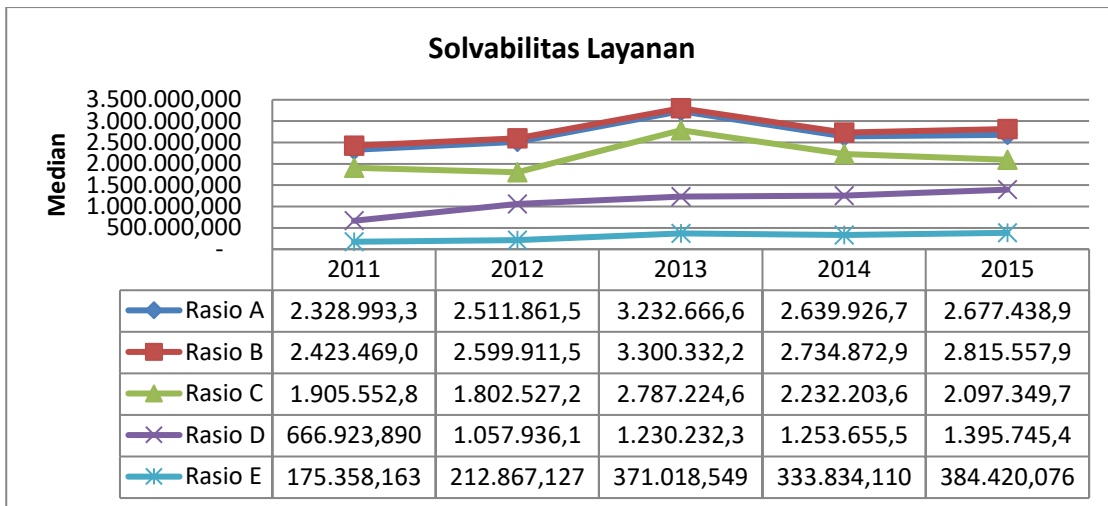
Tren Nilai Median Solvabilitas Layanan
Level Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Median Solvabilitas Layanan
Level Pemerintah Kota Tahun 2011 s.d 2015



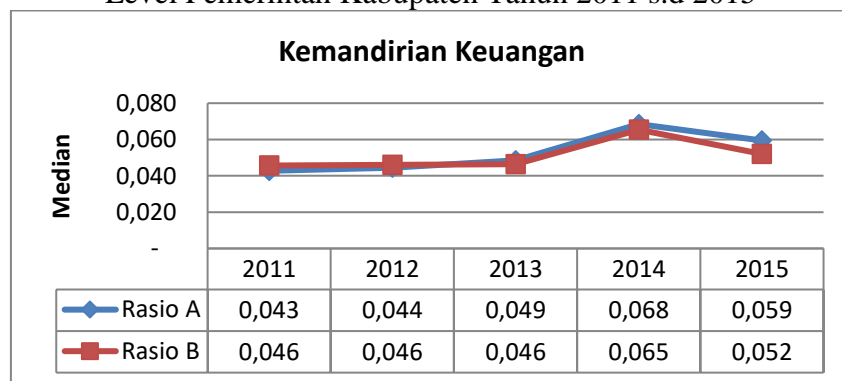
Tren Nilai Median Solvabilitas Layanan
Level Pemerintah Provinsi Tahun 2011 s.d 2015



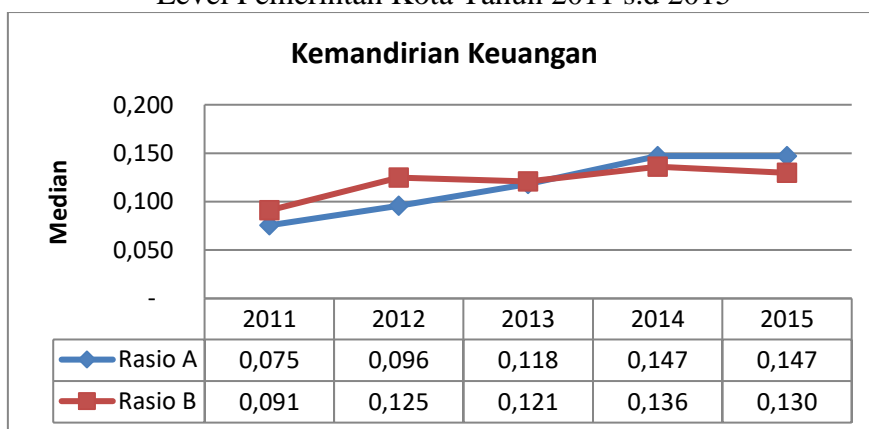
LAMPIRAN 6

TREN KEMANDIRIAN KEUANGAN

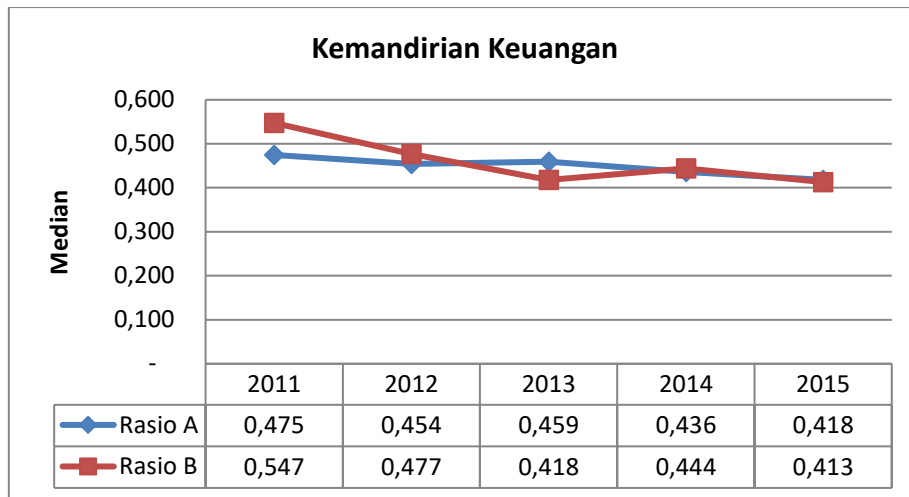
Tren Nilai Median Rasio Kemandirian Keuangan
Level Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Median Kemandirian Keuangan
Level Pemerintah Kota Tahun 2011 s.d 2015



Tren Nilai Median Kemandirian Keuangan
Level Pemerintah Provinsi Tahun 2011 s.d 2015



LAMPIRAN 7

**Data Kurtosis dan Skewness Rasio Keuangan Level Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten Tahun 2011 s.d 2015**

Dimensi	Indikator	Level Pemkab		Level Pemkot		Level Pemprov	
		Kurtosis	Skewness	Kurtosis	Skewness	Kurtosis	Skewness
Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio A	45,326	6,508	42,000	6,481	21,000	4,583
	Rasio B	43,759	6,377	42,000	6,481	21,000	4,583
	Rasio C	43,489	6,352	42,000	6,481	21,000	4,583
Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio A	20,606	3,723	-1,114	0,667	0,499	1,182
	Rasio B	98,507	9,280	42,000	6,481	20,999	4,582
	Rasio C	100,593	9,381	42,000	6,481	20,999	4,582
Solvabilitas Anggaran	Rasio A	3,155	1,427	0,864	0,577	16,010	3,822
	Rasio B	3,830	1,524	0,868	0,583	5,751	2,012
	Rasio C	4,162	1,706	-0,865	0,693	5,690	2,172
	Rasio D	3,833	0,299	-0,253	0,229	14,172	3,507
	Rasio E	1,386	-0,816	2,145	-1,158	-2,239	-0,096
	Rasio F	1,491	-0,868	2,171	-1,191	-2,604	0,005
	Rasio G	5,720	1,955	-0,287	0,219	-0,654	0,675
	Rasio H	2,673	-1,477	3,330	-1,509	-2,099	-0,334
Fleksibilitas Keuangan	Rasio A	5,841	1,898	-0,820	0,777	14,629	3,583
	Rasio B	6,071	1,919	-0,893	0,708	14,848	3,609
	Rasio C	-	-	-	-	-	-
	Rasio D	-	-	-	-	-	-
Solvabilitas Layanan	Rasio A	19,319	3,951	-0,252	1,096	-0,347	0,968
	Rasio B	19,052	3,921	-0,299	1,074	-0,310	0,972
	Rasio C	15,363	3,463	-0,310	1,050	-0,364	0,867
	Rasio D	25,864	4,616	0,894	1,302	-0,181	1,074
	Rasio E	38,779	5,702	0,792	1,288	0,789	1,164
	Rasio F	-	-	-	-	-	-
Kemandirian Daerah	Rasio A	0,601	1,033	0,916	0,991	4,647	-1,726
	Rasio B	0,704	1,049	0,726	0,837	2,466	-0,973
	Rasio C	-	-	-	-	-	-
	Rasio D	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 8

INDEKS DIMENSI, INDEKS KONDISI KEUANGAN, DAN KATEGORI

LEVEL PEMERINTAH KABUPATEN TAHUN 2015

NO	PEMDA	SOLV. JANGKA PENDEK	SOLV. JANGKA PANJANG	SOLV. ANGGARAN	SOLV. OPERASIONAL	FLEKSI KEUANGAN	SOLV. LAYANAN	KEMAND. KEU	IKK	KATEGORI
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Kabupaten Berau	0,013	0,146	0,722	0,684	0,896	0,270	0,791	0,504	SEHAT
2	Kabupaten Sukamara	0,031	0,311	0,758	0,908	0,885	0,260	0,218	0,482	SEHAT
3	Kabupaten Lamandau	0,207	0,692	0,670	0,537	0,552	0,199	0,371	0,462	SEHAT
4	Kabupaten Kutai Barat	0,000	0,110	0,918	0,953	0,589	0,326	0,151	0,436	SEHAT
5	Kabupaten Kutai Timur	0,000	0,171	0,782	0,635	0,792	0,229	0,174	0,398	SEHAT
6	Kabupaten Barito Timur	1,000	0,053	0,426	0,506	0,323	0,089	0,252	0,379	SEHAT
7	Kabupaten Kotabaru	0,003	0,049	0,603	0,529	0,485	0,054	0,798	0,361	CUKUP
8	Kabupaten Tanah Laut	0,004	0,038	0,426	0,640	0,393	0,057	0,933	0,356	CUKUP
9	Kabupaten Tanah Bumbu	0,000	0,054	0,574	0,466	0,559	0,050	0,717	0,346	CUKUP
10	Kabupaten Balangan	0,004	0,052	0,711	0,556	0,666	0,116	0,279	0,341	CUKUP
11	Kabupaten Tana Tidung	0,101	0,262	0,151	0,145	0,376	1,000	0,317	0,336	CUKUP
12	Kabupaten Kutai Kartanegara	0,000	0,334	0,509	0,586	0,437	0,200	0,279	0,335	CUKUP
13	Kabupaten Kotawaringin Timur	0,001	0,049	0,493	0,491	0,389	0,027	0,855	0,329	CUKUP
14	Kabupaten Kotawaringin Barat	0,000	0,042	0,566	0,390	0,302	0,046	0,899	0,321	CUKUP
15	Kabupaten Kapuas Hulu	0,001	0,003	0,524	0,503	0,572	0,078	0,537	0,317	CUKUP
16	Kabupaten Tabalong	0,003	0,068	0,503	0,489	0,270	0,083	0,790	0,315	CUKUP
17	Kabupaten Landak	0,006	0,072	0,619	0,784	0,519	0,032	0,160	0,313	CUKUP
18	Kabupaten Murung Raya	0,004	0,011	0,557	0,556	0,663	0,189	0,196	0,311	CUKUP
19	Kabupaten Tapin	0,007	0,060	0,547	0,675	0,478	0,095	0,297	0,309	CUKUP
20	Kabupaten Seruyan	0,001	0,051	0,679	0,575	0,389	0,093	0,316	0,301	CUKUP
21	Kabupaten Gunung Mas	0,017	0,139	0,535	0,746	0,392	0,128	0,127	0,298	CUKUP
22	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,017	0,058	0,530	0,464	0,252	0,059	0,674	0,294	CUKUP
23	Kabupaten Katingan	0,033	0,174	0,607	0,554	0,426	0,106	0,142	0,292	CUKUP
24	Kabupaten Sekadau	0,002	0,030	0,554	0,642	0,487	0,035	0,278	0,290	CUKUP
25	Kabupaten Paser	0,000	0,114	0,486	0,611	0,291	0,170	0,298	0,282	CUKUP
26	Kabupaten Kayong Utara	0,006	0,054	0,569	0,713	0,517	0,075	0,000	0,277	CUKUP
27	Kabupaten Pulang Pisau	0,001	0,038	0,526	0,702	0,363	0,122	0,165	0,274	CUKUP
28	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,001	0,046	0,345	0,600	0,190	0,070	0,649	0,272	CUKUP
29	Kabupaten Sintang	0,002	0,066	0,484	0,493	0,373	0,041	0,426	0,269	CUKUP
30	Kabupaten Barito Kuala	0,003	0,041	0,497	0,670	0,269	0,038	0,328	0,264	CUKUP
31	Kabupaten Banjar	0,001	0,041	0,391	0,407	0,095	0,016	0,874	0,261	CUKUP
32	Kabupaten Kubu Raya	0,000	0,037	0,482	0,602	0,244	0,005	0,451	0,260	CUKUP
33	Kabupaten Penajam Paser Utara	0,000	0,067	0,555	0,498	0,256	0,178	0,259	0,259	CUKUP
34	Kabupaten Barito Utara	0,019	0,108	0,434	0,577	0,254	0,146	0,260	0,257	CUKUP
35	Kabupaten Sanggau	0,018	0,005	0,554	0,537	0,179	0,005	0,465	0,252	CUKUP
36	Kabupaten Ketapang	0,003	0,074	0,439	0,415	0,377	0,036	0,406	0,250	CUKUP
37	Kabupaten Bengkayang	0,001	0,028	0,551	0,571	0,374	0,037	0,184	0,250	CUKUP
38	Kabupaten Malinau	0,000	0,100	0,389	0,271	0,121	0,514	0,280	0,240	CUKUP
39	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,005	0,074	0,373	0,471	0,238	0,048	0,457	0,238	CUKUP
40	Kabupaten Kapuas	0,002	0,001	0,474	0,618	0,128	0,045	0,369	0,234	CUKUP
41	Kabupaten Melawi	0,000	0,028	0,568	0,534	0,255	0,049	0,093	0,218	KURANG
42	Kabupaten Nunukan	0,002	0,122	0,174	0,125	0,277	0,205	0,611	0,217	KURANG
43	Kabupaten Pontianak	0,009	0,048	0,439	0,506	0,063	0,027	0,368	0,209	KURANG
44	Kabupaten Sambas	0,000	0,036	0,376	0,397	0,061	0,009	0,357	0,177	KURANG
45	Kabupaten Bulungan	0,000	0,000	0,042	0,028	0,017	0,282	0,712	0,155	KURANG

LAMPIRAN 9

INDEKS DIMENSI, INDEKS KONDISI KEUANGAN, DAN KATEGORI LEVEL PEMERINTAH KOTA TAHUN 2015

NO	PEMDA	SOLV. JANGKA PENDEK	SOLV. JANGKA PANJANG	SOLV. ANGGARAN	SOLV. OPERASIONAL	FLEKSI. KEUANGAN	SOLV. LAYANAN	KEMAND. KEU	IKK	KATEGORI
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Kota Balikpapan	0,419	0,995	0,536	0,705	1,000	0,320	0,956	0,705	SEHAT
2	Kota Banjarbaru	0,778	0,683	0,703	0,896	0,549	0,293	0,427	0,619	SEHAT
3	Kota Pontianak	0,315	0,771	0,885	0,711	0,609	0,027	0,835	0,594	CUKUP
4	Kota Palangka Raya	1,000	0,370	0,546	0,727	0,261	0,270	0,172	0,478	CUKUP
5	Kota Bontang	0,025	0,358	0,434	0,504	0,569	1,000	0,049	0,420	CUKUP
6	Kota Samarinda	0,000	0,000	0,691	0,602	0,183	0,357	0,326	0,309	CUKUP
7	Kota Singkawang	0,233	0,081	0,630	0,570	0,242	0,127	0,241	0,304	CUKUP
8	Kota Banjarmasin	0,081	0,059	0,557	0,614	0,240	0,045	0,432	0,290	CUKUP
9	Kota Tarakan	0,029	0,407	0,021	0,000	0,000	0,540	0,026	0,146	KURANG

LAMPIRAN 10

INDEKS DIMENSI, INDEKS KONDISI KEUANGAN, DAN KATEGORI LEVEL PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2015

NO	PEMDA	SOLV. JANGKA PENDEK	SOLV. JANGKA PANJANG	SOLV. ANGGARAN	SOLV. OPERASIONAL	FLEKSI. KEUANGAN	SOLV. LAYANAN	KEMAND. KEU	IKK	KATEGORI
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Provinsi Kalimantan Timur	0,250	1,000	0,674	0,286	0,841	0,921	0,848	0,689	SEHAT
2	Provinsi Kalimantan Utara	1,000	0,000	0,354	0,882	1,000	0,544	0,000	0,541	CUKUP
3	Provinsi Kalimantan Selatan	0,168	0,396	0,465	0,785	0,160	0,214	1,000	0,456	CUKUP
4	Provinsi Kalimantan Barat	0,050	0,229	0,250	0,421	0,012	0,000	0,716	0,240	CUKUP
5	Provinsi Kalimantan Tengah	0,004	0,131	0,544	0,085	0,067	0,355	0,323	0,216	KURANG

LAMPIRAN 11

Pemerintah Daerah dengan Indeks Kondisi Keuangan Tertinggi di Kalimantan Tahun 2011 s.d 2015

2011	IKK	2012	IKK	2013	IKK	2014	IKK	2015	IKK
PEMERINTAH PROVINSI									
Prov. Kaltim	0,73	Prov. Kaltim	0,54	Prov. Kaltim	0,62	Prov. Kaltara	0,71	Prov. Kaltim	0,69
Prov. Kalteng	0,48	Prov. Kalbar	0,43	Prov. Kalteng	0,59	Prov. Kaltim	0,34	Prov. Kaltara	0,54
Prov. Kalsel	0,33	Prov. Kalsel	0,29	Prov. Kalsel	0,33	Prov. Kalsel	0,20	Prov. Kalsel	0,46
PEMERINTAH KOTA									
Kota Tarakan	0,78	Kota Balikpapan	0,81	Kota Balikpapan	0,64	Kota Balikpapan	0,66	Kota Balikpapan	0,71
Kota Bontang	0,44	Kota Bontang	0,48	Kota Bontang	0,58	Kota Bontang	0,49	Kota Banjarbaru	0,62
Kota Balikpapan	0,39	Kota Tarakan	0,47	Kota Tarakan	0,57	Kota Tarakan	0,46	Kota Pontianak	0,59
Kota Pontianak	0,19	Kota Pontianak	0,30	Kota Pontianak	0,54	Kota Singkawang	0,34	Kota Palangka Raya	0,48
Kota Banjarbaru	0,12	Kota Samarinda	0,29	Kota Banjarbaru	0,24	Kota Banjarbaru	0,24	Kota Bontang	0,42
PEMERINTAH KABUPATEN									
Kab. Malinau	0,55	Kab. Tana Tidung	0,41	Kab. Paser	0,58	Kab. Tana Tidung	0,46	Kab. Berau	0,50
Kab. Paser	0,49	Kab. Paser	0,37	Kab. Tana Tidung	0,41	Kab. Berau	0,35	Kab. Sukamara	0,48
Kab. Nunukan	0,39	Kab. Tapin	0,34	Kab. Katingan	0,35	Kab. Barito Utara	0,32	Kab. Lamandau	0,46
Kab. Berau	0,38	Kab. Berau	0,29	Kab. Berau	0,28	Kab. Barito Selatan	0,30	Kab. Kutai Barat	0,44
Kab. Tapin	0,35	Kab. Kutai Kartanegara	0,28	Kab. Bulungan	0,26	Kab. Paser	0,27	Kab. Kutai Timur	0,40

Sumber : LHP Pemerintah daerah di Kalimantan Tahun 2011 s.d 2015

LAMPIRAN 12

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Peringkat	Pemkab	Kemakmuran (ribu rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	Jumlah Penduduk Usia Produktif (%)	Upah Minimum Kab (Rp)	Belanja Pegawai Terhadap Total
Tertinggi	Pemkab. Berau	145.698,84	218.124	9.846	9,94	52,55	2.381.300,00	21,53%
	Pemkab. Sukamara	52.094,84	55.321	2.370	14,46	68,42	2.026.472,00	25,31%
	Pemkab. Lamandau	49.450,00	73.975	3.370	11,53	68,92	2.062.784,00	26,27%
	Rata-Rata	82.414,56	115.807	5.195	11,98	63,30	2.156.852,00	24,37%
Terendah	Pemkab. Nunukan	85.014,64	177.607	9.840	12,47	61,75	2.100.000,00	30,73%
	Pemkab. Sambas	28.040,00	523.115	49.260	82,00	63,33	1.650.000,00	44,37%
	Pemkab. Bulungan	92.739,98	138.227	10.930	10,48	64,99	2.200.000,00	23,58%
	Rata-Rata	68.598,21	279.650	23.343	34,98	63,36	1.983.333,33	32,89%